

Analisis Penerbitan Sertifikat Kesehatan Kapal *Tugboat* PT Pelayaran Kartika Samudra Adijaya di Samarinda

Gloria Jelita Maharani Fangidae¹, Jumriani², Abdul Rahman³

Program Pendidikan Diploma IV Pelayaran, Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar^{1,2,3}

Email Korespodensi: gloriajelitamf515@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 04-04-2026
Disetujui 12-04-2026
Diterbitkan 14-04-2026

ABSTRACT

Analysis of the Issuance of Health Certificates for Tugboats by PT Pelayaran Kartika Samudra Adijaya in Samarinda (supervised by Jumriani and Abdul Rahman). The purpose of this study was to analyze the factors causing delays in the issuance of tugboat health certificates and the relationship between internal and external factors influencing the delays in the issuance of ship health certificates by the Port Health Office (KKP). The study used a qualitative descriptive method with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. Data analysis was conducted over a one-year period, from July 2024 to July 2025, at PT Pelayaran Kartika Samudra Adijaya. The results show that delays in the issuance of ship sanitation certificates are caused by internal and external factors. Internal factors include substandard ship sanitation conditions, such as poor cleanliness of the kitchen and bathrooms, as well as a lack of sanitation supervision by the crew. External factors are related to the inspection process conducted by the Port Health Office, which requires corrective actions and re-inspection when non-compliance is found. The relationship between these factors indicates that low sanitation readiness increases the likelihood of re-inspection, thereby delaying the issuance process of ship sanitation certificates.

Keywords: Ship sanitation certificate; Delay; Ship sanitation

ABSTRAK

Analisis Penerbitan Sertifikat Kesehatan Kapal *Tugboat* PT Pelayaran Kartika Samudra Adijaya Di Samarinda (dibimbing oleh Jumriani dan Abdul Rahman). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor penyebab penundaan sertifikat kesehatan kapal *tugboat* serta menganalisis hubungan antara faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keterlambatan proses penerbitan sertifikat kesehatan kapal oleh KKP. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan selama satu tahun mulai dari Juli 2024 – Juli 2025 di PT Pelayaran Kartika Samudra Adijaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan penerbitan sertifikat kesehatan kapal disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kondisi sanitasi kapal yang belum memenuhi standar, seperti kebersihan dapur dan kamar mandi yang kurang terjaga serta kurangnya pengawasan kebersihan oleh awak kapal. Faktor eksternal berkaitan dengan proses pemeriksaan oleh KKP yang mengharuskan adanya perbaikan dan inspeksi ulang apabila ditemukan ketidaksesuaian. Hubungan antara kedua faktor tersebut menunjukkan bahwa rendahnya kesiapan sanitasi kapal akan meningkatkan kemungkinan dilakukannya inspeksi ulang, sehingga memperlambat proses penerbitan sertifikat kesehatan kapal.

Katakunci: Sertifikat kesehatan kapal; Penundaan; Sanitasi kapal

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Maharani Fangidae, G. J., Jumriani, J., & Rahman, A. (2026). Analisis Penerbitan Sertifikat Kesehatan Kapal Tugboat PT Pelayaran Kartika Samudra Adijaya di Samarinda. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(3), 3885-3899. <https://doi.org/10.63822/avq4nd54>

PENDAHULUAN

Sertifikat kapal merupakan salah satu instrumen penting dalam menjamin keselamatan, kelayakan operasional, serta legalitas kapal dalam kegiatan pelayaran. Sertifikat ini berfungsi sebagai bukti bahwa kapal telah memenuhi standar keselamatan, keamanan, dan kelayakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Sonhaji, 2018; Fatah et al., 2019). Salah satu dokumen penting dalam sistem sertifikasi tersebut adalah sertifikat kesehatan kapal, yang menunjukkan bahwa kapal berada dalam kondisi bersih, bebas dari vektor penyakit, serta memenuhi standar sanitasi yang ditetapkan.

Industri maritim memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas perdagangan, transportasi, dan distribusi barang di Indonesia. Oleh karena itu, setiap kapal wajib mematuhi regulasi keselamatan dan kesehatan, termasuk kepemilikan Sertifikat Kesehatan Kapal. Sertifikat ini diterbitkan oleh otoritas berwenang sebagai bukti bahwa kapal tidak berpotensi menjadi media penyebaran penyakit dan telah memenuhi standar kebersihan sesuai dengan *International Health Regulations* serta peraturan nasional (Mosyofa & Muammar, 2024). Dalam konteks nasional, Permenkes Nomor 40 Tahun 2015 tentang Sertifikat Sanitasi Kapal menegaskan bahwa kapal harus bebas dari faktor risiko kesehatan seperti vektor dan hewan pembawa penyakit yang dapat membahayakan manusia.

Namun demikian, dalam praktiknya proses penerbitan Sertifikat Kesehatan Kapal masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa laporan dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), khususnya di wilayah Kalimantan, menunjukkan adanya penundaan penerbitan sertifikat pada kapal tugboat yang disebabkan oleh dua kelompok faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kondisi sanitasi kapal yang belum memenuhi standar, seperti kebersihan dapur dan kamar mandi yang kurang terjaga serta lemahnya pengawasan kebersihan oleh awak kapal. Sementara itu, faktor eksternal berkaitan dengan prosedur pemeriksaan oleh KKP yang mengharuskan adanya perbaikan dan inspeksi ulang apabila ditemukan ketidaksesuaian (Nainggolan & Sabila, 2024).

Selain itu, karakteristik operasional kapal tugboat yang memiliki frekuensi pelayaran tinggi dan waktu sandar yang terbatas turut memengaruhi kondisi sanitasi kapal. Aktivitas operasional yang padat sering menyebabkan awak kapal mengabaikan jadwal pembersihan rutin, sehingga meningkatkan potensi ditemukannya ketidaksesuaian saat inspeksi. Data internal perusahaan pada periode 2024–2025 menunjukkan adanya rata-rata 2–3 kasus penundaan penerbitan Sertifikat Kesehatan Kapal dengan durasi keterlambatan sekitar 1–3 hari, yang berdampak pada terganggunya jadwal keberangkatan kapal (*sailing schedule*) serta potensi kerugian operasional.

Sebagai salah satu perusahaan pelayaran, PT Pelayaran Kartika Samudra Adijaya memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa kapal yang dikelola memenuhi standar kesehatan dan sanitasi sesuai regulasi. Implementasi Permenkes Nomor 40 Tahun 2015 menjadi aspek penting dalam menjaga kesehatan awak kapal, mencegah penyebaran penyakit, serta meningkatkan kepatuhan terhadap standar nasional. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk memahami faktor-faktor penyebab penundaan penerbitan sertifikat kesehatan kapal serta hubungan antara faktor internal dan eksternal yang memengaruhi proses tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab penundaan penerbitan Sertifikat Kesehatan Kapal tugboat serta mengkaji hubungan antara faktor internal dan eksternal dalam memengaruhi keterlambatan proses penerbitannya oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan teknik wawancara untuk menggambarkan data yang diperoleh dari narasumber guna menjawab permasalahan penelitian. Menurut Sugiyono (2016), metode kualitatif disebut sebagai penelitian *naturalistic* karena dilakukan pada kondisi alami dengan peneliti sebagai *human instrument*.

Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta di lapangan. Penelitian bersifat deskriptif karena mengungkap masalah berdasarkan kondisi sebenarnya secara utuh. Dalam hal ini, peneliti memperoleh gambaran terkait proses penerbitan, kendala, serta upaya mengatasi kendala dalam penerbitan Sertifikat Kesehatan Kapal tugboat PT Pelayaran Kartika Samudra Adijaya.

Definisi Operasional Variabel

1. Penundaan Penerbitan Sertifikat Kesehatan Kapal

Penundaan merupakan kondisi ketika proses pengajuan hingga penerbitan sertifikat tidak selesai sesuai waktu yang direncanakan akibat ketidaksesuaian persyaratan teknis maupun administratif saat inspeksi oleh KKP. Penundaan dapat berupa tertundanya inspeksi ulang, penerbitan dokumen, atau *clearance* kapal. Dengan demikian, penundaan merujuk pada keterlambatan akibat belum terpenuhinya standar sanitasi sesuai Permenkes Nomor 40 Tahun 2015.

2. Sertifikat Kesehatan Kapal

Sertifikat Kesehatan Kapal adalah dokumen resmi dari KKP yang menyatakan bahwa kapal telah memenuhi standar kebersihan dan kesehatan. Penilaian meliputi kebersihan dapur, ruang makanan, kamar mandi, ruang awak, air bersih, limbah, serta pengendalian vektor penyakit. Sertifikat ini menunjukkan kapal layak beroperasi dan memiliki masa berlaku tertentu.

3. Faktor Penyebab Penundaan

Faktor penyebab penundaan adalah kondisi yang menghambat proses penerbitan sertifikat, baik dari internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi kondisi sanitasi kapal yang belum memenuhi standar, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan proses pemeriksaan oleh KKP yang mengharuskan perbaikan sebelum sertifikat diterbitkan.

Unit Analisis

Penelitian dilakukan selama praktik darat selama 1 tahun, yaitu 31 Juli 2024 – 31 Juli 2025 di PT Pelayaran Kartika Samudra Adijaya, Samarinda. Unit analisis adalah proses penerbitan Sertifikat Kesehatan Kapal tugboat milik perusahaan tersebut melalui observasi langsung.

Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Observasi

Observasi dilakukan secara langsung selama praktik darat untuk mengamati hambatan dalam proses penerbitan sertifikat kesehatan kapal tugboat.

2. Teknik Wawancara

Penelitian menggunakan wawancara terstruktur dengan pertanyaan yang telah disusun secara sistematis sebelum pelaksanaan wawancara.

3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tertulis guna memperkuat hasil observasi dan wawancara, serta membantu mengidentifikasi masalah dalam proses penerbitan sertifikat.

Teknik Analisis Data

Data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis dengan cara mengelompokkan ke dalam kategori yang relevan, seperti kendala teknis. Selanjutnya dilakukan triangulasi untuk memastikan keakuratan data. Hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi deskriptif guna mengidentifikasi masalah dan memberikan rekomendasi perbaikan. .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan saat Praktik Darat (PRADA) di PT Pelayaran Kartika Samudra Adijaya (KSA) Site Samarinda. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa logistik maritim, khususnya transportasi batu bara dan komoditas lainnya di tingkat nasional dan internasional sejak tahun 1994.

Dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, KSA memiliki armada sekitar 250 tugboat dan tongkang serta 9 floating crane, dengan kapasitas angkut sekitar 150 juta ton per tahun (PTKSA - PT Kartika Samudra Adijaya).

Adapun layanan yang disediakan meliputi:

a. Tug & Barges

Layanan utama berupa pengoperasian tugboat sebagai penarik tongkang untuk mengangkut muatan curah. Didukung armada besar, sistem operasional terkoordinasi, dan tenaga kerja berpengalaman, layanan ini berjalan efisien, tepat waktu, serta sesuai standar keselamatan dan regulasi.



Gambar.1 Tug & Barges Sumber: PT Pelayaran Kartika Samudra Adijaya, 2025

a. Floating Crane

TKSA juga menyediakan layanan Floating Crane, yaitu crane terapung untuk kegiatan bongkar muat di laut maupun pelabuhan terbatas. Alat ini digunakan dalam proses *transshipment* untuk memindahkan muatan antara tongkang dan kapal induk. Pengoperasiannya mengikuti standar keselamatan yang ketat, sehingga mampu meningkatkan efisiensi bongkar muat, mempercepat waktu operasional, dan mendukung distribusi logistik di wilayah dengan fasilitas pelabuhan terbatas.



Gambar 2 Floating Crane

Sumber: PT Pelayaran Kartika Samudra Adijaya, 2025

b. CPO Tanker

Selain muatan curah, perusahaan juga mengoperasikan armada CPO Tanker untuk pengangkutan minyak kelapa sawit mentah (CPO). Kapal ini dirancang sesuai standar keselamatan dan pengangkutan muatan cair. Layanan ini mendukung distribusi industri kelapa sawit dengan menjamin keamanan, kualitas, dan ketepatan waktu pengiriman. Operasionalnya didukung prosedur penanganan yang sesuai standar, sistem pengawasan terkoordinasi, serta tenaga kerja kompeten sehingga berjalan aman dan efisien.



Gambar 3 CPO Tanker

Sumber: PT Pelayaran Kartika Samudra Adijaya, 2025

c. Shipyard

Sebagai penunjang operasional, PT Pelayaran Kartika Samudra Adijaya memiliki fasilitas shipyard untuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan kapal agar tetap laik laut. Fasilitas ini berperan dalam kegiatan docking, pemeriksaan, dan perbaikan komponen kapal. Dengan galangan sendiri, perusahaan dapat mengontrol kualitas perawatan secara lebih optimal dan efisien, serta memastikan armada tetap aman, andal, dan sesuai standar pelayaran.



Gambar 4 Shipyard

Sumber: PT Pelayaran Kartika Samudra Adijaya, 2025

PT Pelayaran Kartika Samudra Adijaya Site Samarinda berlokasi di:

Alamat : Jl. Jelawat No.23, Sidomulyo, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur
75242

Telepon: +62 215 276 016

Website: <https://ptksa.id/>

Email : info@ptksa.id



Gambar 5 Kantor PT KSA Site Samarinda

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2025

1. Visi Misi Perusahaan

a. Visi

Menjadi perusahaan pelayaran nasional yang bersaing dan menjadi pilihan utama bagi pelanggannya di sektor *tug* dan *barge* operator.

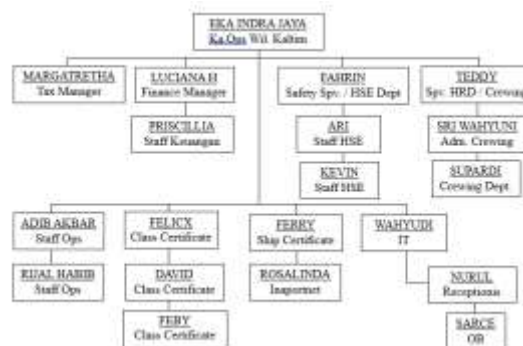
b. Misi

Membangun sebuah perusahaan yang disegani dibidang *tug* dan *barge* dengan memberikan layanan yang fleksibel, efektif, dan efisien dengan menjalin hubungan yang saling menguntungkan.

2. Jam Kerja Perusahaan

PT Pelayaran Kartika Samudra Adijaya Site Samarinda menerapkan sistem kerja 5 hari (Senin–Jumat) pukul 08.00–17.00 WITA dengan istirahat pukul 12.00–13.00 WITA. Aktivitas di luar jam kerja hanya diperbolehkan untuk keperluan mendesak. Pegawai memperoleh libur pada Sabtu dan Minggu serta mengikuti hari libur nasional sesuai ketentuan pemerintah.

3. Struktur Organisasi Perusahaan



Gambar 6 Struktur Organisasi PT KSA Site Samarinda

Sumber: PT Pelayaran Kartika Samudra Adijaya, 2025

Secara garis besar tugas masing-masing divisi adalah sebagai berikut:

a. Ka. Ops Wil Kaltim

- 1) Bertanggung jawab atas seluruh operasional armada kapal, termasuk perencanaan, pengawasan, dan pengendalian agar berjalan efektif, efisien, serta sesuai standar keselamatan dan kebijakan perusahaan.
- 2) Mengawasi dan memantau kinerja seluruh pegawai operasional agar pelayaran berjalan sesuai jadwal dan prosedur.
- 3) Menindaklanjuti setiap insiden operasional melalui pelaporan dan investigasi, serta menjaga komunikasi yang efektif antar awak kapal untuk kelancaran operasional.
- 4) Menandatangani kontrak kerja laut sebagai pengesahan hubungan kerja sesuai ketentuan yang berlaku.

a. *Finance Department*

- 1) Mengurus pembukuan uang perusahaan serta mengawasi pergerakan dana di bank.
- 2) Menata seluruh arus masuk dan keluar uang perusahaan.
- 3) Staff Keuangan membantu *Finance Manager* dalam pencatatan transaksi harian, pengelolaan administrasi keuangan, serta dokumentasi laporan keuangan perusahaan.

b. *Tax Manager*

Tax Manager bertanggung jawab mengelola dan menyusun laporan perpajakan perusahaan, termasuk pembuatan laporan pajak bulanan dan tahunan, memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, serta mengawasi transaksi keuangan yang berkaitan dengan kewajiban pajak.

c. *HSE Department*

- 1) Bertanggung jawab memastikan penerapan ISM Code dan sistem keselamatan kerja berjalan efektif, termasuk pengawasan prosedur, standar operasional, penggunaan APD, serta menjaga aspek kesehatan, keselamatan, dan lingkungan untuk meminimalkan risiko.
- 2) Melakukan investigasi setiap insiden kerja secara menyeluruh untuk menemukan penyebab, serta memastikan tindakan perbaikan dan pencegahan guna meningkatkan sistem keselamatan dan mencegah kejadian berulang.

d. *Crewing Department*

- 1) Supervisor HRD/Crewing bertanggung jawab mengelola SDM awak kapal, meliputi rekrutmen, penempatan, evaluasi kinerja, serta pengaturan jadwal sign on dan sign off.
- 2) Admin Crewing mengelola administrasi awak kapal, termasuk crew list, kontrak kerja laut, dan dokumen pendukung lainnya.
- 3) Crewing Department mendukung koordinasi kebutuhan tenaga kerja kapal serta memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen awak kapal.

e. *Operational Department*

- 1) Bertanggung jawab atas operasional kapal, meliputi perencanaan, pengawasan, dan pengendalian pelayaran agar sesuai jadwal, standar operasional, serta ketentuan keselamatan dan administrasi.
- 2) Mengelola dan memantau pergerakan kapal di wilayah operasional untuk memastikan kelancaran kegiatan dan kesiapan pelayaran.
- 3) Berkoordinasi dengan nakhoda terkait laporan operasional, kondisi kapal, cuaca, dan kendala agar operasional tetap aman dan efektif.

f. *Class Certificate*

- 1) Mengurus dokumen sertifikat klasifikasi kapal yang dikeluarkan oleh badan klasifikasi seperti BKI.

2) Mengatur jadwal pemeriksaan, mengatur jadwal inspeksi kapal, serta mengurus perpanjangan sertifikat klasifikasi supaya kapal selalu memenuhi aturan teknis dan keselamatan.

g. *Ship Certificate*

1) Mengurus segala berkas dan dokumen yang berhubungan dengan kapal, termasuk Surat Kesehatan Kapal, Surat Keselamatan Kapal, dan Surat persetujuan berlayar lainnya.

2) Mengajukan pembaharuan dokumen kapal, bekerja sama dengan instansi terkait seperti Agen, KKP, dan BKI, serta memastikan dokumen kapal selalu siap untuk clearance.

i. Inaportnet

1) Mengelola administrasi kapal melalui sistem Inaportnet, memastikan data sesuai dokumen resmi agar proses kedatangan dan keberangkatan kapal berjalan lancar.

2) Mengurus perizinan operasional kapal seperti izin sandar, clearance out, bongkar muat, serta pengisian BBM, dan memastikan seluruh proses terkoordinasi dengan baik melalui sistem Inaportnet.

j. IT Department

1) Bertanggung jawab atas sistem teknologi informasi di perusahaan. Pekerjaannya mencakup menjaga jaringan, sistem komputer, dan memberikan bantuan teknis untuk aplikasi sehari-hari seperti SINKARKES dan Inaportnet.

k. Receptionis

1) Bertanggung jawab dalam pengurusan administrasi umum di kantor.

2) Membantu kelancaran komunikasi yang efektif di dalam dan diluar perusahaan

3) Membantu dalam pengurusan pengadaan barang yang diminta oleh kantor

l. OB (Office Boy)

Bertanggung jawab menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan kantor serta mendukung kenyamanan kerja. Selama PRADA, bertugas sebagai cadet yang membantu administrasi dan operasional pelayaran, termasuk memantau masa berlaku sertifikat kesehatan kapal, mengurus perpanjangan ke KKP, serta menyiapkan dokumen kapal untuk proses clearance in dan out.

Hasil Penelitian

1. Proses Penerbitan Sertifikat Kesehatan Kapal Tugboat di PT Pelayaran Kartika Samudra Adijaya

Setiap kapal yang akan clearance wajib memiliki Sertifikat Kesehatan Kapal yang masih berlaku sebagai bukti memenuhi standar kesehatan. Jika masa berlaku (6 bulan) hampir habis, perusahaan harus segera mengajukan perpanjangan agar proses clearance tidak terhambat. Tahapannya meliputi beberapa langkah berikut:

- a. Tahap awal dimulai dengan pengajuan permohonan penerbitan atau perpanjangan Sertifikat Kesehatan Kapal melalui website SINKARKES oleh perusahaan atau agen agar administrasi tercatat secara digital dan memudahkan pemeriksaan awal oleh KKP.



Gambar 7 website layanan SINKARKES

Sumber: sinkarkes.kemkes.go.id, 2025

- b. Perusahaan atau agen mengisi data administrasi kapal secara lengkap serta memilih KKP tujuan pelayanan, kemudian melanjutkan proses hingga memperoleh kode billing sebagai dasar pembayaran PNBP.



Gambar 8 Pengisian Informasi Kapal

Sumber: sinkarkes.kemkes.go.id, 2025

- c. Setelah kode billing diterbitkan oleh pihak terkait, perusahaan pelayaran atau agen kapal selanjutnya melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan nominal yang telah tercantum dalam sistem pembayaran. Besarnya biaya PNBP yang harus dibayarkan tersebut ditentukan berdasarkan ukuran Gross Tonnage (GT) kapal, sehingga semakin besar GT kapal maka semakin besar pula jumlah pembayaran yang wajib dipenuhi sebelum proses penerbitan sertifikat kesehatan kapal dapat dilanjutkan.
- d. Kemudian pihak Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) berkoordinasi dengan agen perusahaan serta awak kapal untuk menetapkan jadwal pelaksanaan pemeriksaan kesehatan kapal. Penentuan jadwal ini disesuaikan dengan waktu sandar kapal, sehingga proses pemeriksaan dapat dilakukan secara efektif tanpa mengganggu aktivitas operasional kapal maupun jadwal keberangkatan yang telah ditetapkan.
- e. Pemeriksaan kesehatan kapal dilaksanakan secara langsung di atas kapal oleh petugas yang berwenang dengan menggunakan *checklist* atau daftar pemeriksaan standar sebagai pedoman penilaian. *Checklist* tersebut mencakup berbagai aspek penting yang berkaitan dengan kondisi sanitasi dan kesehatan lingkungan kapal, seperti kebersihan area *galley* (dapur kapal), *pantry*, gudang penyimpanan, ruang muatan (*cargo*), ruang tidur awak kapal, ruang mesin, ketersediaan serta kualitas air bersih, fasilitas medis yang tersedia di kapal, serta area-area lainnya yang berpotensi mempengaruhi kesehatan dan keselamatan awak kapal selama pelayaran.
- f. Apabila hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas menunjukkan bahwa seluruh aspek kesehatan, sanitasi, dan kebersihan kapal telah memenuhi standar yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku, maka kapal akan diberikan *Ship Sanitation Control Exemption*

Certificate (SSCEC) sebagai bukti bahwa kapal dinyatakan bebas dari faktor risiko kesehatan yang dapat menimbulkan penularan penyakit. Namun, apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya ketidaksesuaian atau kondisi yang belum memenuhi persyaratan, seperti kebersihan area tertentu yang kurang memadai atau fasilitas sanitasi yang tidak sesuai standar, maka kapal diwajibkan untuk melakukan tindakan penyehatan atau perbaikan terlebih dahulu. Setelah tindakan tersebut selesai dilakukan dan dinyatakan memenuhi ketentuan, barulah sertifikat SSCEC dapat diterbitkan oleh pihak Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).

- g. Jika *Ship Sanitation Control Exemption Certificate* (SSCEC) telah diterbitkan oleh pihak Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), maka tahap selanjutnya adalah penyerahan sertifikat tersebut kepada perusahaan pelayaran atau agen kapal yang mewakili. Penyerahan sertifikat ini menjadi bentuk pengesahan resmi bahwa kapal telah melalui proses pemeriksaan kesehatan dan sanitasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan diterbitkannya SSCEC, kapal dinyatakan telah memenuhi standar kesehatan lingkungan kapal yang telah ditetapkan, sehingga kapal dinilai layak dan aman untuk melaksanakan kegiatan operasional serta berlayar di wilayah perairan Indonesia.

2. Faktor Penyebab Penundaan Penerbitan Sertifikat Kesehatan Kapal *Tugboat*

Hasil penelitian ini sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Peneliti mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hal ini membantu peneliti memahami secara mendalam permasalahan yang muncul dalam penerbitan sertifikat kesehatan bagi kapal *tugboat* milik PT KSA di Samarinda. Semua data yang telah diperoleh akan dijelaskan dan dibahas seperti berikut ini:

- a. Kondisi Dapur dan Kamar Mandi Kapal *Tugboat* Saat Pemeriksaan Oleh Tim KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan). Berdasarkan observasi selama praktik darat di PT Pelayaran Kartika Samudra Adijaya, ditemukan bahwa kebersihan dapur dan kamar mandi kapal *Tugboat* belum memenuhi standar saat inspeksi KKP, seperti adanya kotoran, peralatan tidak rapi, serta sanitasi yang kurang terjaga. Hal ini disebabkan kurangnya konsistensi awak kapal dalam menjaga kebersihan karena lebih fokus pada operasional utama.

Dari sisi eksternal, pemeriksaan KKP menggunakan standar tertentu, sehingga jika ditemukan ketidaksesuaian, kapal harus melakukan perbaikan dan menunggu inspeksi ulang, yang menyebabkan keterlambatan penerbitan sertifikat. Dengan demikian, keterlambatan dipengaruhi oleh kesiapan internal kapal dan proses pemeriksaan eksternal; semakin baik persiapan sanitasi, semakin cepat sertifikat diterbitkan.



Gambar 9 Area Dapur Kapal

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2025



Gambar 10 Temuan ketidaksesuaian Area Wastafel

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2025



Gambar 11 Temuan Ketidaksesuaian Area Kamar Mandi

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2025

Kategori	Temuan Utama
Internal	1. Sisa kotoran di wastafel, peralatan makan berserakan, noda dinding/sudut lantai kamar mandi, area kloset & saluran pembuangan belum bersih menyeluruh
	2. Pengawasan kebersihan belum konsisten sehingga memperbesar peluang temuan saat terjadi inspeksi
Eksternal	1. Pemeriksaan mencakup banyak area dan terdapat ketidaksesuaian di kapal yang wajib dilakukan perbaikan dulu
	2. Inspeksi ulang KKP setelah perbaikan sehingga ada tambahan durasi tunggu sampai sertifikat bisa diterbitkan

- b. Masalah kebersihan dapur dan kamar mandi kapal menghambat penerbitan Sertifikat Kesehatan Kapal, sehingga kapal harus melakukan pembersihan terlebih dahulu dan menunggu inspeksi ulang dari KKP, yang menyebabkan proses menjadi lebih lama.
- c. Inspeksi ulang oleh KKP dilakukan untuk memastikan perbaikan telah sesuai standar, terutama pada kebersihan dapur dan kamar mandi. Jika sudah memenuhi ketentuan, sertifikat kesehatan kapal dapat diterbitkan



Gambar 12 SSCEC

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2025

3. Upaya PT Pelayaran Kartika Samudra Adijaya Dalam Menangani Kendala Penundaan Penerbitan Sertifikat Kesehatan Kapal *Tugboat*

Dalam mengatasi keterlambatan penerbitan Sertifikat Kesehatan Kapal, PT Pelayaran Kartika Samudra Adijaya melakukan langkah perbaikan dan pencegahan melalui koordinasi antara manajemen darat dan awak kapal guna memastikan kelancaran operasional dan kepatuhan terhadap regulasi

a. Penerapan Pengawasan dan Pembersihan Rutin Kapal

Perusahaan memberikan arahan kepada awak kapal untuk menjaga kebersihan dan sanitasi secara rutin, terutama di area dapur dan kamar mandi, sesuai standar yang berlaku. Langkah ini bertujuan mencegah temuan saat inspeksi KKP agar proses penerbitan sertifikat berjalan lancar. Selain itu, dilakukan pengawasan internal oleh nakhoda dan perwira kapal untuk memastikan kondisi sanitasi tetap terjaga sebelum inspeksi.

b. Pembinaan dan Sosialisasi Disiplin Sanitasi Awak Kapal

Perusahaan memberikan teguran dan arahan kepada nakhoda serta melakukan sosialisasi berkala kepada awak kapal untuk meningkatkan kesadaran dan disiplin dalam menjaga kebersihan, terutama di area berisiko tinggi, guna memenuhi standar kesehatan dan mencegah hambatan penerbitan sertifikat.

KESIMPULAN

Penundaan penerbitan sertifikat kesehatan kapal disebabkan oleh faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Faktor internal meliputi kondisi sanitasi kapal yang belum memenuhi standar, seperti kebersihan dapur dan kamar mandi serta kurangnya pengawasan dari awak kapal. Sementara itu, faktor eksternal berkaitan dengan proses inspeksi oleh KKP yang mengharuskan adanya perbaikan dan inspeksi ulang apabila ditemukan ketidaksesuaian, sehingga memperpanjang waktu penerbitan sertifikat.

Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan pengawasan sanitasi melalui pelaksanaan inspeksi internal secara rutin sebelum pemeriksaan resmi dilakukan. Di sisi lain, nakhoda dan seluruh awak kapal juga perlu meningkatkan kesadaran, disiplin, dan tanggung jawab dalam menjaga kebersihan kapal secara berkelanjutan. Selain itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih lanjut terkait efektivitas sistem pengawasan serta pemanfaatan teknologi guna mendukung percepatan proses penerbitan sertifikat kesehatan kapal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, R., Kusumawati, E., Pribadi, T., Sianturi, I., & Amrullah, R. A. (2025). Analisis Proses Pelayanan PT. Taraka Samudera Sejahtera Selaku Keagenan Kapal Di PLTU Lontar Banten. *Jurnal Maritim Malahayati*, 6(1), 270–274. <https://doi.org/10.70799/JUMMA.V6I1.116>
- Azara, R. (2020). *Buku Ajar Manajemen Operasional Dan Implementasi Dalam Industri*. <https://doi.org/10.21070/2020/978-623-6833-48-3>
- Chandradja, J., & Sabila, H. (2025). Prosedur Perpanjangan Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Melalui Sistem SIMKAPEL pada Kantor KSOP Kelas I Dumai oleh PT. Samudera Sarana Karunia Dumai. *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen*, 4(2), 75–81. <https://doi.org/10.55606/JUPIMAN.V3I3.4527>
- Diyanah, K., Khanifah, A., & Pawitra, A. (2021). Analisis Hygiene Sanitasi Kapal Di Wilayah Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. *Sanitasi: Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 14(2), 75–83. <https://doi.org/10.29238/SANITASI.V14I2.997>
- Fatah, A., Ramdhani Fathurachman, E., & Suaka Bahari Cirebon, A. (2019). Peranan Perusahaan Pelayaran Dalam Rangka Kelancaraan Pengurusan Perpanjangan Sertifikat Kapal Di Pelabuhan Merak Banten. In *Jurnal Sains Teknologi Transportasi Maritim: I* (Number 2).
- Hartati, R., & Anggarini, Y. (2016). Analisis Perbedaan Efektivitas Organisasi ditinjau dari kesesuaian, Kekuatan, dan Tipe Budaya. *Telaah Bisnis*, 15(2). <https://doi.org/10.35917/tb.v15i2.22>
- Mosyofa, A., & Muammar, N. (2024). Kebijakan Maritim Indonesia Dalam Menunjang Sistem Keamanan Transportasi Laut. *Riset Sains Dan Teknologi Kelautan*, 7(1), 46–50. <https://doi.org/10.62012/SENSISTEK.V7I1.31639>
- Nainggolan, R., & Sabila, F. H. (2024). Proses Penerbitan Dokumen Port Health Quarantine Clearance (PHQC) Kesehatan Kapal pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I oleh PT. Tarunacipta Kencana Cabang Dumai. *Maeswara Jurnal Riset Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, 2(5), 123. <https://doi.org/10.61132/maeswara.v2i5.1288>
- Permenkes Nomor 40 Tahun 2015. (2015). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015*. Kementerian Kesehatan RI.
- PTKSA - PT Kartika Samudra Adijaya. (n.d.). Retrieved November 26, 2025, from <https://ptksa.id/about>
- Rikardo, D., Saleh, S., & Hanief, M. (2023). Optimalisasi penerapan keselamatan kerja dalam upaya pencegahan kecelakaan kru pada saat bekerja di Kapal MV. Cepat. *Journal Marine Inside*, 46–52. <https://doi.org/10.62391/EJMI.V5I2.67>
- Setiawan, I., & Setiawan, P. E. (2018). Penerapan Tax Review Sebagai Dasar Evaluasi Atas Pemenuhan Kewajiban Perpajakan PPH Badan Dan PPN. *E-Jurnal Akuntansi*, 245. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i01.p10>
- Siregar, D. (2025). Sistem Pengawasan Pemerintahan Dalam Peningkatan Pelayanan Publik (Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang). *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(2), 851–862. <https://doi.org/10.51878/SOCIAL.V5I2.6597>
- Siregar, G. A., Siregar, N. S., & Sabila, F. H. (2024). Prosedur Penerbitan Sertifikat Safe Manning Kapal pada Kantor Syahbandar oleh PT. Gardatama Anugerah Segara Sejahtera Batam. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*, 3(1), 173–181. <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v3i1.2744>
- Sonhaji. (2018). Pemberian Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dalam Upaya Pemenuhan Keselamatan Berlayar. *Administrative Law and Governance Journal*, 1(3), 299–305. <https://doi.org/10.14710/ALJ.V1I3.299-305>

- Souto, C. de M. R., & Neto, J. da S. C. (2017). Qualidade de Serviços: Uma análise comparativa entre SERVQUAL e SERVPERF. *Journal of Perspectives in Management*, 1(1).
<https://doi.org/10.51359/2594-8040.2017.231693>
- Srivastava, R. (2022). *Service Quality Control using Queuing Theory*. 1(1).
<https://doi.org/10.54878/ejbess.169>
- Studi, P., Perpustakaan, I., Adab, F., & Humaniora, D. (2023). SEJARAH PENERBITAN DAN PERCETAKAN DI INDONESIA Saphira Marchelinka Article History. In *HYPOTHESIS : Multidisciplinary Journal of Social Sciences* (Vol. 02).
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tiga Aha, R., Dimas Pramudya, A., Halel, C. C., Widyagama, S., Malang, H., & Aha, R. T. (2025). Inspeksi Sanitasi Kapal Dengan Standar Kesehatan. In *Media Husada Journal of Environmental Health* (Vol. 5, Number 1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran*. (n.d.).
- Water, sanitation, hygiene and health a Primer For Health Professionals*. (n.d.).